



Memperkuat Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Merata

Oleh :

M. Arliyan Syahril, M.Pd, Dr. H. Khairani, M.Pd.I
H. Muhammad Afif Bizri, SH,M.Hum, Hairul Ikhwan, S.Hut.
Hj. Rusmaliah, S.Hut. Yunita Anggeriana, S.Hut.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke 4 Pasal 31 ayat 1 dan 3 dengan tegas menyatakan bahwa (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pemerintah wajib membiayainya, serta dalam ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang (Sistem Pendidikan Nasional).

Hal ini menegaskan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menyelenggarakan serta mengusahakan suatu pendidikan pada setiap warga negaranya guna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan diatas diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 5 ayat (1) menyatakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 6 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pasal 11 ayat 2 pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negaranya yang berusia 7 sampai 15 tahun.



Amanat Undang-Undang tersebut mengakibatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Ringkasan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. HSS dari tahun ke tahun terus meningkat, komponen pembentuk IPM salah satunya adalah pendidikan dengan dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator ini menunjukkan performa positif, dimana harapan lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 12,38 tahun meningkat menjadi 12,48 di 2024. Begitupula dengan indikator rata-rata lama sekolah dimana pada tahun 2021 sebesar 7,76 tahun meningkat menjadi 8,09 tahun pada 2024.

Namun ada beberapa data dan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa angka partisipasi murni masih rendah dan cenderung mengalami penurunan, angka partisipasi murni kategori jenjang pendidikan SD/MI di Kab. HSS 99,60 pada 2023 turun menjadi 98,83 di 2024, jenjang pendidikan SMP/MTs dari 82,23 pada 2023 menjadi 81,57 pada 2024, sedangkan jenjang SMA/MA/SMK mengalami peningkatan dari 64,61 pada 2023 menjadi 64,77 di 2024.

Hasil rapor pendidikan Kab. HSS Tahun 2024 menggambarkan beberapa indikator yang relatif masih jauh dibawah indikator yang lain. Salah satunya adalah indikator kualitas pendidikan, dimana dari seluruh kewenangan jenjang pendidikan pada indikator ini tidak ada yang berwarna hijau bahkan ada yang merah. Begitupula dengan indikator kemampuan literasi dan numerasi murid masih ada yang merah. Terkait SMK ada beberapa indikator yang harus jadi catatan, yaitu ; indikator penyerapan lulusan SMK dan indikator kemitraan dan keselarasan SMK dengan dunia kerja.

Menjawab tantangan tersebut Pemerintah Daerah Kab. HSS dapat mengambil peran strategis dalam beberapa hal : *Pertama*; pemerataan akses pendidikan, *Kedua*; peningkatan kualitas guru, *Ketiga*; pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah, *Keempat*; digitalisasi dan inovasi pembelajaran, *Kelima*; kebijakan afirmasi untuk daerah 3T.

Peran yang harus diperkuat oleh Pemerintah Daerah Kab. HSS untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata adalah : *Pertama* ; Peran Perencana Dan Pengarah Kebijakan, *Kedua* ; Peran Penggerak Pemerataan Akses Pendidikan, *Ketiga* ; Peran Pengembang Dan Penjamin Mutu Guru, *Keempat* ; Peran Pendorong Inovasi Dan Kolaborasi Sekolah, *Kelima* ; Peran Peningkat Sarana Dan Infrastruktur, *Keenam* ; Peran Pelindung Dan Pemberi Layanan Perlindungan Anak, dan *Ketujuh* ; Peran Kolaborator Dan Advokasi Publik.

TINJAUAN KEBIJAKAN

Pendidikan merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun bangsa. Sejak tahun 1972 UNESCO memberikan penegasan bahwa pendidikan memiliki fungsi kunci membuka jalan untuk membangun dan memperbaiki negara. Pendidikan merupakan sektor penting dalam pembangunan nasional karena memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas.

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya di bidang pendidikan, salah satunya dengan menerbitkan program wajib belajar sejak 2 Mei 1984. Salah satu indikator keberhasilan program ini adalah dengan peningkatan angka partisipasi sekolah. Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadikan pendidikan sebagai sektor utama pembangunan dan memahami bahwa pendidikan berkualitas dan merata adalah hak semua anak bangsa, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis sesuai amanat UU tentang Pemerintahan Daerah dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci mewujudkan pendidikan berkualitas dan merata.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indikatornya Kabupaten Hulu Sungai Selatan
(Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020), 2021–2024

Tahun Year	Umur Harapan Hidup Life Expectancy Age (tahun)	Harapan Lama Sekolah Expected Years of Schooling (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah Mean Years of Schooling (tahun)	Pengeluaran Per Kapita Expenditure Per Capita (ribu rupiah/ jiwa/tahun)	IPM HDI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2021	71,78	12,38	7,76	12.736	71,93
2022	72,15	12,40	7,79	13.157	72,47
2023	72,52	12,46	7,86	13.743	73,21
2024	72,82	12,48	8,09	14.150	73,95

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/Badan Pusat Statistik–Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun ke tahun terus meningkat, komponen pembentuk IPM salah satunya adalah pendidikan yang direpresentasikan dengan dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator ini menunjukkan performa positif, dimana harapan lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 12,38 tahun meningkat menjadi 12,48 di tahun 2024. Begitupula dengan indikator rata-rata lama sekolah dimana pada tahun 2021 sebesar 7,76 tahun meningkat menjadi 8,09 tahun pada tahun 2024.

Namun ada beberapa data dan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa angka partisipasi murni masih rendah dan cenderung mengalami penurunan, angka partisipasi murni kategori jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan 99,60 pada tahun 2023 turun menjadi 98,83 di tahun 2024, jenjang pendidikan SMP/MTs dari 82,23 pada tahun 2023 menjadi 81,57 tahun 2024, sedangkan jenjang SMA/MA/SMK mengalami peningkatan dari 64,61 tahun 2023 menjadi 64,77 di tahun 2024.

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2023 dan 2024

Jenjang Pendidikan Educational Level	Angka Partisipasi Murni (APM) Net Participation Rates		Angka Partisipasi Kasar (APK) Gross Participation Rates	
	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI Elementary School	99,60	98,83	112,60	111,27
SMP/MTs Junior High School	82,23	81,57	88,86	93,71
SMA/SMK/MA Senior High School	64,61	64,77	83,82	77,10

- APK memberikan gambaran umum tentang partisipasi pendidikan
- APM memberikan gambaran yang lebih spesifik tentang partisipasi penduduk usia sekolah yang sebenarnya
- APK dan APM penting untuk mengevaluasi tingkat partisipasi pendidikan dan merencanakan intervensi yang tepat

Sumber
Publikasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Angka
Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Volume 43, 28 Februari 2025

Data-data ini mampu mengukur keberhasilan pendidikan khususnya program wajib belajar. Kondisi ini menjadi anomali ketika berhadapan dengan komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang telah memberikan alokasi anggaran negara sebesar 20% untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Rapor Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Rapor Pendidikan Indonesia Tahun 2024
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Rapor Pendidikan Indonesia Tahun 2025
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Keterangan ■ Baik ■ Sedang ■ Kurang ■ Tidak tersedia Indikator tidak berlaku

Rapor Pendidikan mencakup indikator-indikator terpilih dari profil pendidikan yang merefleksikan prioritas kementerian. Data Rapor Pendidikan berasal dari hasil Asesmen Nasional (AN), Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sistem pendataan pendidikan yang dikelola Kementerian Agama (EMIS), Badan Pusat Statistik (BPS), aplikasi yang dipergunakan untuk guru dan tenaga kependidikan (seperti PMM, ARKAS, dan SIMPKB), dan Badan Akreditasi Nasional (BAN) serta *Tracer Study* (khusus data jenjang SMK).

Pada Rapor Pendidikan terdapat empat belas indikator prioritas yang dapat memberi gambaran kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Rapor pendidikan selain menggambarkan empat belas indikator, juga menggambarannya sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dan Provinsi serta juga berbasis jenjang pendidikan.

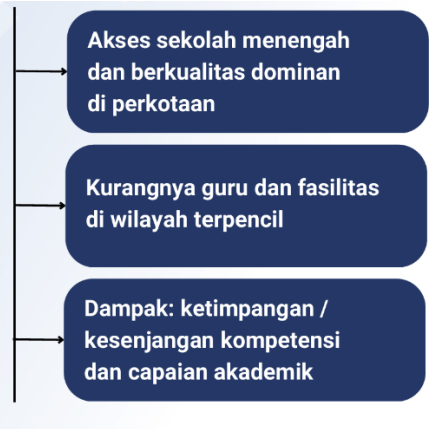
Hasil rapor pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 dan 2025 menggambarkan beberapa indikator yang relatif masih jauh dibawah indikator yang lain. Salah satunya adalah indikator kualitas pembelajaran, dimana pada Tahun 2024 dari seluruh kewenangan jenjang pendidikan pada indikator ini tidak ada yang berwarna hijau bahkan ada yang merah. Namun pada Rapor Tahun 2025 ada perbaikan dan sudah ada yang masuk kategori hijau, walaupun ada beberapa yang tidak tersedia datanya.

Begitupula dengan indikator kemampuan literasi, numerasi murid dan iklim kebhenikaan sekolah masih ada yang merah. Terkait SMK ada beberapa indikator yang harus jadi catatan, yaitu ; indikator penyerapan lulusan SMK dan indikator kemitraan dan keselarasan SMK dengan dunia kerja. Walaupun demikian di dalam Rapor Tahun 2025 sudah ada perbaikan.

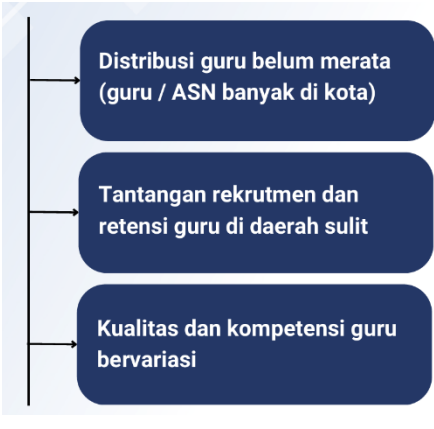
Rapor Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 dan 2025 ini setidaknya dapat difungsikan dalam dua fungsi utama, yaitu sebagai referensi utama untuk menganalisis, merencanakan, dan menindaklanjuti peningkatan kualitas pendidikan, serta sebagai instrumen evaluasi sistem pendidikan secara menyeluruh. Sehingga dapat memberikan gambaran kondisi pendidikan, baik di tingkat satuan pendidikan maupun daerah, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu pendidikan.

Kondisi tantangan dunia pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta diperkuat dengan angka-angka seperti dipaparkan di atas tentu harus menjadi perhatian besar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengelola pembangunan lebih khusus di bidang pendidikan. Ada beberapa tantangan nyata yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bidang pendidikan, antara lain :

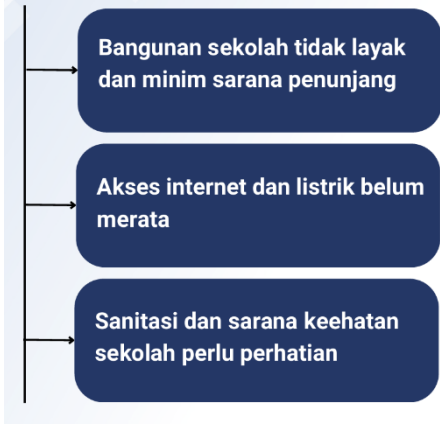
Kesenjangan Pendidikan Desa-Kota



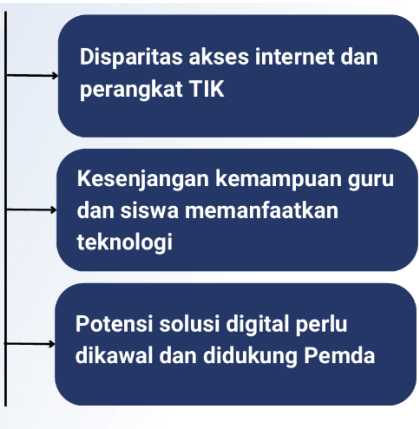
Permasalahan Guru



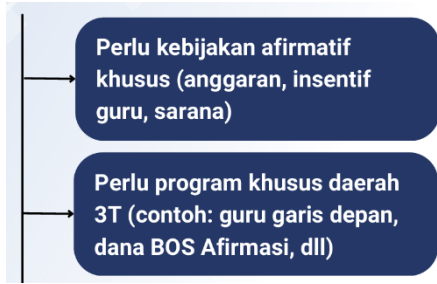
Infrastruktur Sekolah



Digitalisasi Pendidikan



Afirmasi Daerah 3T



Menjawab tantangan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat mengambil peran strategis dalam beberapa hal : *Pertama*; pemerataan akses pendidikan, *Kedua*; peningkatan kualitas guru, *Ketiga*; pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah, *Keempat*; digitalisasi dan inovasi pembelajaran, *Kelima*; kebijakan afirmasi untuk daerah 3T.

Kelima peran strategis ini dapat dijabarkan sebagai berikut :



Tantangan besar dan peran strategis yang harus diambil tentu mengharuskan sebuah kunci, yaitu Kolaborasi. Kolaborasi dalam memajukan dunia pendidikan merupakan bentuk kerjasama multi-level antara berbagai pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, industri, hingga dan masyarakat dapat saling bekerjasama untuk meraih tujuan bersama, yaitu menghasilkan manfaat yang signifikan di berbagai lapisan pendidikan demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata. Kolaborasi ini menjadi pilar utama dalam memajukan kualitas dan relevansi pendidikan di seluruh pelosok negeri. Tidak ada Daerah Kabupaten / Kota yang dapat maju sendiri tanpa ada kolaborasi.

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab di dalam memajukan daerahnya berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerahnya, ini juga termasuk tanggung jawab di dalam memajukan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai institusi yang memiliki wewenang tersebut telah melaksanakan tugas dan kewajibannya di dalam melaksanakan otonomi pendidikan.

Peran yang harus diperkuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata adalah : *Pertama* ; Peran Perencana Dan Pengarah Kebijakan, *Kedua* ; Peran Penggerak Pemerataan Akses Pendidikan, *Ketiga* ; Peran Pengembang Dan Penjamin Mutu Guru, *Keempat* ; Peran Pendorong Inovasi Dan Kolaborasi Sekolah, *Kelima* ; Peran Peningkat Sarana Dan Infrastruktur, *Keenam* ; Peran Pelindung Dan Pemberi Layanan Perlindungan Anak, dan *Ketujuh* ; Peran Kolaborator Dan Advokasi Publik.

Peran Perencana Dan Pengarah Kebijakan

- a. Menyusun rencana induk pendidikan daerah (local education roadmap) yang berbasis data nyata (IPM, SPM Pendidikan, AN, rapor mutu, dan pemetaan ketimpangan desa-kota).
- b. Sinkronisasi RPJMD dengan Renstra Pendidikan agar arah pembangunan pendidikan jelas dan konsisten.
- c. Fokus pada pengurangan disparitas desa-terpencil dan desa-perkotaan

Peran Penggerak Pemerataan Akses Pendidikan

- a. Mendirikan atau menugaskan satuan pendidikan di wilayah minim layanan (seperti desa terpencil atau daerah yang tidak ada SMP/SMA dalam radius wajar).
- b. Bekerja sama dengan Kemenag untuk memfasilitasi pendidikan madrasah dan pesantren.
- c. Transportasi sekolah atau beasiswa transport bagi anak anak dari daerah terpencil.
- d. Mendorong digitalisasi sekolah dan literasi TIK berbasis desa

Peran Pengembang Dan Penjamin Mutu Guru

- a. Menjamin pemerataan distribusi guru, terutama guru ASN dan PPPK ke daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terpencil).
- b. Memberi insentif khusus atau afirmasi bagi guru di daerah sulit.
- c. Meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan (PKB, MGMP, KKG, komunitas belajar)

Peran Pendorong Inovasi Dan Kolaborasi Sekolah

- a. Mengembangkan ekosistem pendidikan daerah yang mendorong inovasi pembelajaran kontekstual lokal.
- b. Mendorong praktik baik antar sekolah (misalnya sekolah rujukan dan sekolah dampingan).
- c. Membentuk Forum Kepala Sekolah dan Komunitas Praktisi Pendidikan lintas kecamatan

Peran Peningkat Sarana Dan Infrastruktur

- a. Rehabilitasi sekolah rusak, pembangunan ruang kelas baru, toilet layak, dan fasilitas disabilitas.
- b. Meningkatkan akses listrik, air bersih, dan konektivitas internet untuk sekolah terpencil.
- c. Menjamin kelayakan dan keberfungsian laboratorium, perpustakaan, dan sarana olahraga

Peran Pelindung Dan Pemberi Layanan Perlindungan Anak

- a. Mendorong kebijakan satuan pendidikan ramah anak dan anti perundungan.
- b. Menyediakan layanan konseling dan perlindungan anak di sekolah bekerja sama dengan Puskesmas dan Dinas Sosial.
- c. Penguatan peran Bunda PAUD dan Forum Anak untuk membangun pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan anak

Peran Kolaborator Dan Advokasi Publik

- a. Membangun kemitraan dengan DPRD, dunia usaha, media lokal, dan tokoh masyarakat.
- b. Menyusun anggaran pendidikan yang berpihak pada keadilan dan prioritas mutu.
- c. Kampanye publik untuk mengajak partisipasi orang tua, masyarakat, dan dunia usaha